

**PENGARUH TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN  
TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH**

**Sukhemi\***)

**Abstract**

*The research aims at analyzing the impact of the range of explanation in finance report towards the transparency of district finance. This research used linear regression model.*

*In collecting data, this empirical research used quota sampling technique. The data are collected by using 200 questionnaires that spread to many stakeholders of district finance report such as legislators, public servant, lecture, and labors. Data was analyzed by using linear regression with program SPSS version 16.*

*The research result shown that the range of explanation in finance report have not influence significantly toward transparency in district finance.*

*Keywords : The range of explanation finance report, transparency*

**Latar Belakang**

Sejak adanya reformasi maka perkembangan paradigma-paradigma baru mempunyai implikasi terhadap kebutuhan ke arah akuntabilitas ganda. Akuntabilitas ganda adalah akuntabilitas atas penganggaran daerah terhadap level yang lebih tinggi (*vertical accountability*) dan juga akuntabilitas yang ditujukan kepada publik (*horizontal accountability*). Masyarakat selaku shareholder dari pemerintah daerah memiliki hak untuk mengetahui penganggaran daerah, bagaimana suatu anggaran direncanakan dan bagaimana suatu anggaran dilaksanakan. Dengan cara ini, publik akan mampu mengukur kinerja dari anggaran daerah. Untuk tetap dapat menjaga tujuan ini, pelaporan anggaran seharusnya dipublikasikan, dengan didasarkan pada prinsip objektivitas, konsistinsi, materialitas, serta pengungkapan (Ramba, 2008)

---

\*) **Sukhemi** adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta

Di Indonesia, permasalahan akuntabilitas publik menjadi sangat penting sejak dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu sejak Januari 2001. Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta penegakan hukum. Otonomi daerah tersebut berdampak pada berbagai aspek, baik aspek politik, hukum, dan sosial, maupun aspek akuntansi dan manajemen keuangan daerah. Reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah kemudian banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik (Sukhemi, 2010).

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan menyebutkan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Sumarlin (2004) dalam Sukhemi (2010) mengatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggara negara tak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Keuangan Negara, karena aspek keuangan negara menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan bangsa, baik dari segi sifat, jumlah maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian bangsa. Hal inilah juga yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi keuangan sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga

laporan keuangan dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Pemenuhan tujuan dan laporan keuangan akan bermanfaat dan dapat memenuhi tujuannya jika memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu : dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*). Informasi dapat dipahami bilamana pengguna dapat memahami laporan keuangan yang disajikan (Nazier,2006).

Darwin (2007) dalam Novita (2008) menyatakan bahwa pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi di dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparansi korporat kepada investor dan *stakeholders* lainnya. Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999) dalam mardiasmo (2006).

### **Perumusan Masalah**

Permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh tingkat pengungkapan laporan keuangan terhadap transparansi keuangan daerah.

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fenomena yang terjadi tentang menguatnya tuntutan transparansi keuangan lembaga-lembaga publik baik di pusat maupun daerah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh tingkat pengungkapan laporan keuangan terhadap transparansi keuangan daerah.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memperkuat bukti empiris mengenai pengaruh tingkat pengungkapan laporan keuangan terhadap transparansi keuangan daerah.
2. Kontribusi praktik berupa masukan kepada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan tingkat pengungkapan laporan keuangan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik.

### **Kajian Teori**

#### **Transparansi Keuangan Daerah**

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip Transparansi memiliki 2 aspek, (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi.

Menurut Schiavo-Campo and Tomasi (1999) yang dikutip Mardiasmo (2006) pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*opennes*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya. Pada saat ini, Pemerintah sudah mempunyai Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan (PP No. 24 Tahun 2005).

Menurut Sri Wisnu (2007) persepsi adanya transparansi pada laporan keuangan dipengaruhi oleh kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Pemda mempunyai sistem informasi keuangan daerah yang memungkinkan laporan keuangannya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, misalnya melalui internet.
2. Pertanggungjawaban laporan keuangan oleh kepala daerah kepada DPRD akhir tahun bersifat terbuka untuk masyarakat umum.
3. Laporan keuangan pemda tidak sekedar dapat diakses (diketahui/diperoleh) oleh DPRD dan auditor, tetapi juga oleh masyarakat luas.
4. Laporan keuangan yang telah diperiksa (diaudit) oleh BPK diumumkan / dipublikasikan di media masa.
5. Selain DPRD dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda), masyarakat mempunyai hak (pada tingkat tertentu) untuk mengetahui hasil pemeriksaan (audit) laporan keuangan yang telah diperiksa (auditor) independent.
6. Hasil kinerja keuangan dan non keuangan pemerintah daerah selama periode tersebut tersedia untuk umum.

### **Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan**

Wolk et al (2004) menyatakan bahwa pengungkapan laporan keuangan berhubungan dengan keseluruhan informasi yang ada dalam laporan keuangan (*financial statement*) dan komunikasi tambahan yang terdiri dari catatan kaki, kejadian setelah tanggal neraca, analisis manajemen dan informasi tambahan di luar biaya historis.

Pernyataan yang senada dikemukakan stecolini (2002) dalam Budi Mulyono (2006) bahwa laporan tahunan, meskipun belum melaporkan akuntabilitas secara keseluruhan

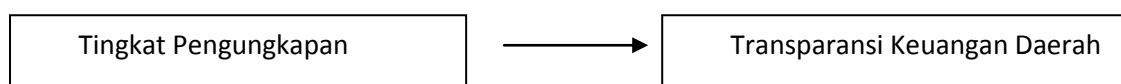
dari entitas pemerintahan, secara umum dipertimbangkan sebagai media utama akuntabilitas. Ia juga mengemukakan bahwa undang-undang yang mengatur mengenai akuntabilitas sektor publik sedang mengalami perubahan mendasar, dengan penekanan pada peranan sistem akuntansi dalam pengukuran dan pengevaluasian baik kinerja keuangan maupun pelayanan, mendorong pengungkapan dan pengkomunikasian hasil-hasil kepada stakeholder. Sebagai konsekuensinya, diberbagai Negara, pelaporan eksternal sedang ditransformasikan agar lebih konsisten dengan kebutuhan akuntabilitas baru.

PSAP nomor 4 tahun 2005 menyatakan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

1. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
5. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

### **Perumusan Hipotesis dan Model Penelitian**

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tuntutan masyarakat akan transparansi pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan transparansi laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengungkapan laporan keuangan mengenai informasi tentang pos-pos laporan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam memenuhi hak publik. Berdasarkan hal tersebut, maka model dalam penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut :



Berdasarkan atas dasar dukungan teori dan bukti empiris di atas, maka dapat dibangun hipotesis: “Tingkat pengungkapan laporan keuangan berpengaruh secara positif signifikan terhadap transparansi keuangan daerah”.

### **Variabel Penelitian**

Penelitian ini melibatkan 2 variabel, yaitu:

1. Tingkat Pengungkapan (X)
2. Transparansi Keuangan (Y)

### **Metode Penelitian**

#### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah stakeholder laporan keuangan pemerintah antara lain anggota DPRD, guru/dosen, pembayar pajak/masyarakat umum dan LSM di

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara *non probabilitas* yaitu *quota sampling*. Menurut Kuncoro (2003), Pengambilan sampel dengan cara ini digunakan untuk memastikan bahwa berbagai subgroup dalam populasi telah terwakili dengan berbagai karakteristik sampel sampai batas tertentu seperti yang dikehendaki oleh peneliti. Dalam *quota sampling*, peneliti menentukan target kuota yang dikehendaki.

### **Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data asli. Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner, artinya dengan membagikan daftar pertanyaan yang berhubungan variabel yang diteliti yaitu tingkat pengungkapan dan transparansi keuangan daerah. Kuesioner diberikan dengan mengantar langsung dan dititipkan kepada staf di kantor, dengan mengadakan perjanjian pengambilannya. Kuesioner kemudian diambil setelah waktu yang dijanjikan tiba.

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Definisi operasional dan pengukuran variabel yang diteliti dalam penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Tingkat Pengungkapan adalah informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan daerah. Tingkat pengungkapan diukur dengan skala Likert mulai poin 1 yang menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan poin 5 yang menyatakan sangat setuju. Variabel ini diukur dengan menggunakan enam pertanyaan yang diadopsi dari PSAP nomor 4 tahun 2005.
2. Transparansi Laporan Keuangan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang



penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi laporan keuangan diukur dengan skala Likert mulai poin 1 yang menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan poin 5 yang menyatakan sangat setuju. Variabel ini diukur dengan menggunakan enam pertanyaan yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Sri Wisnu (2007).

### **Pengujian Hipotesis**

Hipotesis dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan laporan keuangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan daerah. Hipotesis ini diuji dengan menggunakan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta X_1 + e$$

Keterangan :

Y = Transparansi Keuangan Daerah

X<sub>1</sub> = Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

e = Faktor-faktor lain yang berpengaruh / variabel pengganggu tak terkendali

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengungkapan laporan keuangan terhadap transparansi keuangan daerah, dan dilakukan dengan menggunakan uji t. Hasil penelitian didapatkan nilai t sebesar 1,716 dan nilai p sebesar 0,089. Berdasarkan nilai  $p > 0,05$ , maka disimpulkan bahwa tingkat pengungkapan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap transparansi keuangan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap transparansi keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pengguna laporan keuangan daerah mempersepsikan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah yang lengkap termasuk informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target termasuk kendalanya, dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan lain, tidak menunjukkan transparansi keuangan daerah. Laporan keuangan daerah agar terpenuhi transparansinya, cukup mengungkap hal-hal yang standar dalam sebuah laporan keuangan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Tingkat pengungkapan laporan keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap transparansi keuangan daerah. Tidak signifikannya variabel tingkat pengungkapan kemungkinan disebabkan pengguna laporan keuangan daerah belum menganggap bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah yang lengkap termasuk informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target termasuk kendalanya, dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan lain, diperlukan dalam transparansi keuangan daerah.

### **Keterbatasan dan Saran**

Evaluasi atas penelitian ini harus mempertimbangkan beberapa keterbatasan dan saran yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian ini:

1. Penelitian hanya menggunakan stakeholder laporan keuangan daerah di yogyakarta, sehingga penelitian ini sulit untuk digeneralisasikan untuk semua stakeholder laporan keuangan di Indonesia.

2. Responden divariasikan untuk semua stakeholder laporan keuangan di Indonesia, agar dapat melihat hasil yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi laporan keuangan daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Budi Mulyono, 2006. Pengaruh Penyajian Neraca daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Tesis S2, Magister Akuntansi UGM (tidak dipublikasikan) Yogyakarta.
- Harry wolk, James Dodd, Michael Tearney, 2004. Accounting Theory. Sixth Edition, South-Western.
- Mardiasmo, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 No. 1, Mei:1-17
- Kuncoro Mudrajat , 2003. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Penerbit Erlangga, Jakarta
- Nazier, M Daeng. 2006. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota Melalui Harmonisasi Kepmendagri 29/2002 dan PP 24/2005
- Novita M., Chaerul D. Djakman. 2008, Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) Pada Laporan Tahunan Perusahaan : Studi Empiris Pada Perusahaan Publik Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006, *SNA XI*, Pontianak
- Ramba, 2008. Akuntabilitas Publik : Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Gubernur, Walikota/Bupati) kepada DPRD, Paper, Program pasca sarjana, UGM, Yogyakarta
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara* -----, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Sri Wisnu H, 2007. Persepsi Stakeholder Terhadap Kriteria Akuntabilitas Keuangan dan Transparansi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tesis S2, Magister Akuntansi UGM (tidak dipublikasikan) Yogyakarta.
- Sukhemi, 2010. Pengaruh Penyajian Nerca Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah, *Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Volume 5, April: 85-100